

KEDUDUKAN NAIK BALANCA DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI SULAWESI SELATAN

Dewi Ardiana Dahlan¹ dan Djoko Sukisno²

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat menentukan besarnya uang balanca dalam hukum perkawinan adat Bugis di Sulawesi Selatan dan akibat jika uang balanca yang ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan tidak dapat dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki

Penelitian mengenai kedudukan naik balanca dalam hukum perkawinan adat Bugis di Sulawesi Selatan merupakan suatu penelitian yang bersifat sosiologis yuridis yaitu penelitian yang berdasarkan penelitian lapangan yang dilengkapi dengan penelitian kepustakaan. 20 (dua puluh) orang responden dipilih menggunakan teknik *non random sampling* dengan cara purposive dan cara pengambilan sampel secara *snowball*. Data primer dan data sekunder penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, kuesioner maupun pedoman wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat menentukan besarnya uang balanca dalam hukum perkawinan adat Bugis di Sulawesi Selatan yaitu tingkat kemampuan ekonomi dan status sosial orangtua calon mempelai perempuan dalam masyarakat serta tingkat pendidikan dan status sosial calon mempelai perempuan itu sendiri dalam masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan diantara kedua calon mempelai tersebut, namun masih dapat dibicarakan secara kekeluargaan dan musyawarah diantara kedua belah pihak untuk mendapatkan suatu kesepakatan demi terlaksananya pernikahan tersebut. Akibat jika penetapan uang balanca tidak dapat dipenuhi oleh keluarga pihak laki-laki berarti tidak tercapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak. Lamaran laki-laki yang bersangkutan dalam keadaan demikian tidak akan diterima dan perkawinanpun tidak akan terlaksana. Bagi kedua calon mempelai yang tidak mau menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh keluarga mereka, maka mereka akan berusaha mengambil jalan pintas yang berbahaya untuk hidup bersama dan menurut mereka jalan yang terbaik adalah kawin lari. Perkawinan seperti ini dihindari oleh masyarakat Bugis karena sangat berkaitan erat dengan *siri* keluarga yang dapat menimbulkan sanksi adat. Hal tersebut dapat dihindari dengan upacara perdamaian atau *Maddeceng*.

Kata Kunci : Kedudukan naik balanca, hukum perkawinan adat Bugis di Sulawesi Selatan

¹ Jalan Andi Pangerang Pettarani Komp.IKIP BII / 27-28 Makassar

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

KEDUDUKAN NAIK BALANCA DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI SULAWESI SELATAN

THE PLACE OF *NAIK BALANCA* IN MARRIAGE LAW OF BUGINESE CUSTOMS IN SOUTH SULAWESI

Dewi Ardiana Dahlan¹ and Djoko Sukisno²

Program Studi Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

The objective of this research is to know the factors that determine the amount of *uang balanca* (dowry) in the marriage law of Buginese customs in South Sulawesi, and the consequence if the amount of *uang balanca* the bride's family has decided cannot be paid by the bridegroom's family.

The research on the place of *naik balanca* in the marriage law of Buginese customs is a sociological and legal research. It conducted field research and library research. It selected 20 respondents using a purposive snowball non-random sampling technique. The primary and secondary data were obtained from field research and library research using document study, questionnaire and guided interview as instruments.

The research results show that the factors determining the amount of *uang balanca* in the marriage law of Buginese customs in South Sulawesi are level of economic capacity and social status in the society of the bride's family, as well as the bride's educational background and her social status in the society. Differences sometimes happen but further negotiation between the two families is possible in order to reach an agreement, for the sake of their children's marriage. The consequence from the bridegroom's inability to pay *uang balanca* is that a sound agreement has not been achieved. The bridegroom's marriage proposal in such a situation will of course not get an approval, and no marriage will be performed. Unable to accept the decision made by their parents, the couple will often take a risky short cut, i.e., an elope will often be regarded as the best alternative solution. Elope is avoided by Buginese society as it closely relates to *siri* of the family, bringing adat punishment. However, the family can prevent *adat* punishment by conducting *maddeceng*, a reconciliation ceremony.

Keywords: the place of *naik balanca*, marriage law of Buginese customs in South Sulawesi

¹ Jalan Andi Pangerang Pettarani Komp. IKIP B II/27-28, Makassar

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta